JMPKP: Jurnal Manajemen Publik dan Kebijakan Publik
Volume 8 Nomor 2, September 2026

Tersedia Online di http://jurnal.umb.ac.id/index.php/JMPKP
ISSN Print : 2685-7499 ISSN Online : 2745-8660

Pemanfaatan Data SIGA dalam Penyusunan Laporan Kinerja pada Kemendukbangga/BKKBN Perwakilan Provinsi Bengkulu: Perspektif *Knowledge Utilization Theory*

Saltani Satrio*, Jatmiko Yogopriyatno, Is Susanti
Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Bengkulu, Jl. W.R. Supratman, Kandang Limun, Kec. Muara Bangka Hulu, Kota Bengkulu, Bengkulu 38371, Indonesia
*saltanisatrio@gmail.com, jyogop@unib.ac.id, issusanti@unib.ac.id

Article History:	
Received	: 19/06/2026
Received in revised form	: 03/07/2026
Accepted	: 29/09/2026

Abstract: Management information systems in public administration are often populated with data that is rarely used as the basis for substantive decision-making. This study examines how data from the Family Information System (SIGA) are used in preparing Performance Reports (LKj) at the Bengkulu Provincial Office of the Ministry of Population and Family Development (Kemendukbangga)/National Population and Family Planning Board (BKKBN). A bibliometric mapping of 150 Scopus-indexed documents (2000–2025) and a review of earlier SIGA studies suggest that, to the authors' knowledge, SIGA data have not been examined as organizational knowledge within the performance reporting cycle. This gap is addressed through Knowledge Utilization Theory, complemented by bounded rationality, to classify use as instrumental, conceptual, or symbolic. A qualitative interpretive-descriptive design was used. Data were collected through semi-structured interviews with seven purposively selected key informants, non-participant observation, and analysis of LKj and related documents for fiscal years 2023–2025, and analyzed using the interactive model of Miles, Huberman, and Saldaña, with source and theory triangulation, member checking, and an audit trail. The findings show a structured, evidence-based planning cycle in which SIGA is the main reference for performance indicators, with a dominant pattern of conceptual instrumental use. Deadline pressure and incomplete data lead officials to satisfice by substituting available data, which risks a drift toward symbolic use. The agency's vertical institutional status substantially dampens political interference. The study contributes an empirically grounded middle-range category between instrumental and symbolic use and offers practical recommendations for integrating SIGA into LKj preparation.

Keywords: SIGA; performance report; knowledge utilization theory; evidence-based planning; public administration

Abstrak: Pemanfaatan sistem informasi manajemen dalam birokrasi publik kerap tidak sesuai dengan ekspektasi normatif: sistem diisi dengan data, tetapi data tersebut jarang digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan yang substantif. Penelitian ini mengkaji pola pemanfaatan data Sistem Informasi Keluarga (SIGA) dalam penyusunan Laporan Kinerja (LKj) pada Kemendukbangga/BKKBN Perwakilan Provinsi Bengkulu. Pemetaan bibliometrik 150 dokumen terindeks Scopus (2000–2025) dan penelaahan studi SIGA terdahulu menunjukkan bahwa, sepanjang pengetahuan penulis, data SIGA belum dikaji sebagai pengetahuan organisasi dalam siklus pelaporan kinerja. Kesenjangan ini dijawab dengan Knowledge Utilization Theory yang dilengkapi bounded rationality untuk

mengklasifikasikan pemanfaatan sebagai instrumental, konseptual, atau simbolis. Penelitian menggunakan desain kualitatif deskriptif interpretatif. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam semi terstruktur terhadap tujuh informan kunci yang dipilih secara purposif, observasi non partisipan, dan analisis dokumen LKj serta dokumen terkait tahun anggaran 2023–2025, lalu dianalisis dengan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña dengan triangulasi sumber dan teori, member checking, dan audit trail. Temuan menunjukkan siklus perencanaan berbasis bukti yang terstruktur dengan SIGA sebagai rujukan utama indikator kinerja, dengan pola dominan pemanfaatan konseptual instrumental. Tekanan tenggat waktu dan ketidaklengkapan data mendorong aparatur menerapkan strategi satisficing berupa substitusi data, yang menimbulkan risiko pergeseran ke arah symbolic use. Status kelembagaan vertikal secara substansial meredam interferensi politik. Penelitian ini menyumbang kategori middle-range yang berdasar empiris di antara pemanfaatan instrumental dan simbolis, serta rekomendasi praktis untuk mengintegrasikan SIGA ke dalam penyusunan LKj.

Kata kunci: SIGA; laporan kinerja; knowledge utilization theory; perencanaan berbasis bukti; administrasi publik

PENDAHULUAN

Reformasi birokrasi di Indonesia menempatkan akuntabilitas kinerja sebagai ukuran utama kualitas tata kelola pemerintahan. Melalui Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), setiap instansi pemerintah wajib menyusun perencanaan, mengukur capaian, dan melaporkan kinerja melalui Laporan Kinerja (LKj) (Presiden Republik Indonesia, 2014). Kualitas LKj ditentukan tidak hanya oleh kelengkapan format, tetapi juga oleh sejauh mana data digunakan secara substantif dalam keputusan. Literatur menunjukkan paradoks: sistem informasi dibangun dan data dikumpulkan secara rutin, tetapi keputusan tidak selalu mengikuti bukti yang tersedia (Nutley et al., 2007). Sofyani et al. (2018) menunjukkan bahwa dua dekade penerapan sistem pengukuran kinerja di pemerintah daerah belum menghasilkan penggunaan data yang bermakna, kondisi yang dalam kerangka Weiss (1979) dekat dengan *symbolic use*.

Objek penelitian ini adalah Kemendukbangga/BKKBN Perwakilan Provinsi Bengkulu, representasi provinsi Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga yang sebelumnya dikenal sebagai BKKBN dan ditata ulang melalui Peraturan Presiden Nomor 180 Tahun 2024 (Presiden Republik Indonesia, 2024). Lembaga ini mengelola Sistem Informasi Keluarga (SIGA), basis data utama program kependudukan yang memuat *Contraceptive Prevalence Rate* (CPR), *Total Fertility Rate* (TFR), *unmet need*, dan profil keluarga dari 9 kabupaten dan 1 kota. Pertanyaannya bukan sekadar apakah SIGA tersedia, melainkan apakah data SIGA benar-benar membentuk penyusunan LKj atau hanya pelengkap administratif.

Penelitian ini berada pada pertemuan tiga rumpun kajian: pemanfaatan pengetahuan di sektor publik (Weiss, 1979), manajemen kinerja dan akuntabilitas, serta sistem informasi pemerintahan. Kualitas data dapat menghambat manajer publik menggunakan informasi kinerja (Deschamps, 2022), data berkualitas pun memerlukan kepemimpinan yang mendampingi deliberasi (Cepiku et al., 2026), pemanfaatan pengetahuan merupakan proses sosial (Laihonen et al., 2024), dan fragmentasi sistem dapat memicu beban entri data berulang (Idaiani et al., 2023). Studi SIGA cenderung membahas *e-government*, antarmuka, atau implementasi aplikasi di unit subnasional (Apriliani et al., 2024; Kasim et al., 2025; Laot et al., 2025), seperti kajian aplikasi pemerintahan lain di JMPKP yang menilai efektivitas aplikasi (Wika & Priambodo, 2024) atau kapasitas aparatur (Anwar et al., 2026), tanpa menelaah bagaimana data yang dihasilkan digunakan dalam keputusan.

Knowledge Utilization Theory

Knowledge Utilization Theory Weiss (1979) berangkat dari pertanyaan mengapa pengetahuan yang diproduksi secara sistematis jarang diterjemahkan langsung ke dalam kebijakan atau tindakan administratif. Penelitian ini memakai tiga modus: *instrumental use*, yaitu data langsung menjadi dasar keputusan konkret (misalnya data CPR atau TFR tervalidasi menentukan target kinerja berikutnya); *conceptual use*, yaitu data membentuk model mental secara bertahap tanpa aplikasi langsung pada keputusan tertentu (misalnya tinjauan rutin SIGA membangun pemahaman tren demografis Bengkulu); dan *symbolic use*, modus paling bermasalah dari perspektif akuntabilitas, yaitu data diinvokasi semata untuk melegitimasi keputusan yang telah dibuat. Laihonen et al. (2024) memandang modus ini sebagai properti *emergent* budaya organisasi, dan Cepiku et al. (2026) menunjukkan bahwa peralihan dari simbolis ke instrumental memerlukan kepemimpinan aktif, deliberasi data terstruktur, dan investasi literasi data.

Bounded rationality dalam pengambilan keputusan administratif

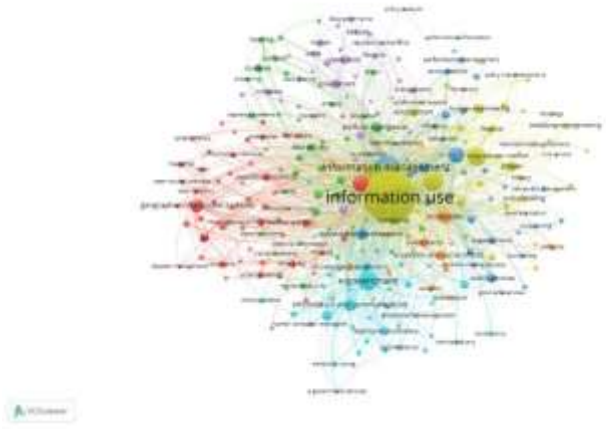
Konsep *bounded rationality* (Simon, 1997) melengkapi kerangka Weiss: dengan informasi tidak lengkap, kapasitas kognitif terbatas, dan tekanan waktu, pengambil keputusan tidak mengoptimalkan, tetapi memuaskan (*satisfice*). Dalam pelaporan kinerja, ketika data SIGA ideal tidak tersedia pada tenggat, aparatur mengganti dengan data yang tersedia. Perilaku ini melibatkan keterlibatan genuine dengan data nyata sehingga berbeda dari *symbolic use* murni, tetapi belum memenuhi standar evidensial *instrumental use* penuh.

SAKIP dan SIGA sebagai konteks pemanfaatan data

Hood (1991) menempatkan pengukuran kinerja berorientasi output sebagai doktrin *New Public Management*, yang di Indonesia terwujud melalui SAKIP dengan insentif kuat bagi kepatuhan formal pelaporan. Isomorfisme institusional (DiMaggio & Powell, 1983) memprediksi bahwa tekanan regulasi semacam itu dapat melemahkan penggunaan data substantif dan mendorong kepatuhan seremonial (Aisyah et al., 2025). SIGA (siga.bkkbn.go.id) sendiri merupakan platform data nasional Kemendukbangga/BKKBN yang menyediakan data terdisagregasi hingga subdistrik, mencakup profil Pendataan Keluarga, peserta KB aktif, Pasangan Usia Subur termasuk *unmet need*, serta data IKU (TFR, CPR) untuk LKj.

Kesenjangan penelitian, kebaruan, dan tujuan

Untuk menguji celah tersebut secara transparan, penulis memetakan literatur Scopus periode 2000–2025 dengan VOSviewer menggunakan kata kunci *knowledge utilization OR evidence based policy OR data driven decision AND public administration AND information system*. Pencarian menghasilkan 150 dokumen. Gambar 1 menunjukkan klaster *information use*, *performance management*, *e-government*, dan sistem informasi kependudukan, sedangkan simpul yang menghubungkan SIGA, *Knowledge Utilization Theory*, dan pelaporan kinerja tidak tampak padat. Hasil ini dibaca sebagai indikasi ruang kajian yang relatif terbuka, bukan bukti tunggal kesenjangan.



Gambar 1. Visualisasi jaringan bibliometrik VOSviewer (literatur terindeks Scopus, 2000–2025)

Sepanjang pengetahuan penulis, belum ditemukan penelitian yang secara empiris mengkaji modus pemanfaatan data SIGA dalam penyusunan LKj. Transisi dari BKKBN ke Kemendukbangga menambah dimensi kontekstual karena adaptasi atas sistem, mandat, dan struktur pelaporan dapat membuka kerentanan terhadap *symbolic use*. Kebaruan

penelitian ini adalah penerapan empiris *Knowledge Utilization Theory* pada data SIGA dalam siklus penyusunan LKj, dengan *bounded rationality* sebagai lensa komplementer. Tujuannya adalah menganalisis pola pemanfaatan data SIGA dalam penyusunan laporan kinerja berdasarkan tiga dimensi Weiss (1979): *instrumental use*, *conceptual use*, dan *symbolic use*.

METODE

Desain dan lokus penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif interpretatif karena perbedaan antara *conceptual* dan *symbolic use* tidak dapat diukur andal dengan kuesioner tertutup akibat bias sosial desirabilitas (Sugiyono, 2015); wawancara semi terstruktur dengan pertanyaan *probing* lebih sesuai untuk menangkap niat dan konteks keterlibatan data. Lokus penelitian adalah Kantor Kemendukbangga/BKKBN Perwakilan Provinsi Bengkulu, dipilih karena tanggung jawab fungsionalnya atas SIGA dan LKj, transformasi kelembagaan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 180 Tahun 2024 yang memberi jendela pengamatan masa transisi, serta heterogenitas geografis 10 kabupaten/kota yang menghasilkan variabilitas cakupan data.

Informan dan pengumpulan data

Tujuh informan kunci dipilih secara *purposive sampling*, dikembangkan melalui *snowball sampling* hingga tercapai kejenuhan data (Sugiyono, 2015), dan profilnya disajikan pada Tabel 1. Wawancara berlangsung 18–90 menit, tatap muka, dalam Bahasa Indonesia, direkam dengan persetujuan informan, dan ditranskripsi secara *verbatim*.

Tabel 1. Profil informan penelitian

Kode	Jabatan
W-001	Ketua tim Kerja 9 “Umum Humas dan Protokol”
W-002	Ketua tim kerja 3 “Pembangunan Keluarga”
W-003	Ketua tim kerja 5 “ Data dan Informasi”
W-004	Ketua tim kerja 6 “ Perencanaan dan Keuangan”
W-005	Pejabat Fungsional Pranata Komputer/Pengelola Data SIGA
W-006	Staf penyusun LKj
W-007	Staf penyusun LKj

Sumber: Data primer penelitian, 2026.

Observasi non partisipan mencakup rapat koordinasi internal, praktik penggunaan SIGA, artefak integrasi SIGA–LKj, dan interaksi tim penyusun LKj dengan pemilik data teknis. Analisis dokumen mencakup LKj tahun anggaran 2023–2025, Perjanjian Kinerja, Renstra,

rekapitulasi data SIGA (TFR, CPR, *unmet need*) yang disilangkan dengan angka dalam LKj, Petunjuk Teknis SIGA, RKAKL, dan notulensi rapat koordinasi.

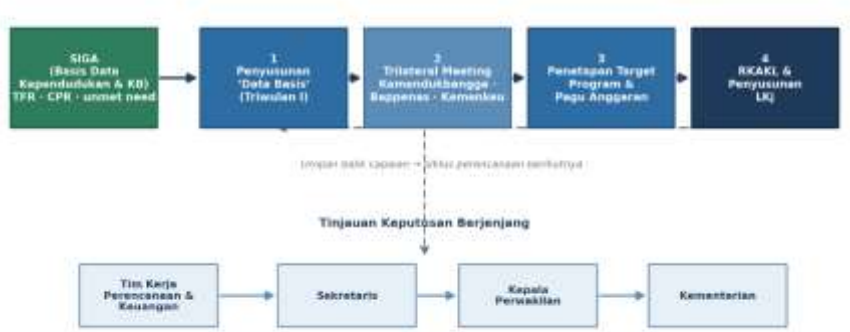
Analisis dan keabsahan data

Analisis mengikuti model interaktif Miles et al. (2019): reduksi data dengan *codebook* berbasis taksonomi Weiss (IU, CU, SU), penyajian data dalam matriks tematik lintas informan dan sumber, serta penarikan kesimpulan. Keabsahan dijaga melalui *member checking*, triangulasi sumber dan teori, serta *audit trail*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Siklus perencanaan terstruktur sebagai prasyarat pelaporan berbasis bukti

Temuan pertama: siklus perencanaan kinerja secara formal terstruktur dan berbasis data sehingga kondusif bagi *instrumental use* (Gambar 2). Siklus diawali dokumen "Data Basis" pada triwulan pertama, dilanjutkan *Trilateral Meeting* antara Kemendukbangga, Bappenas, dan Kementerian Keuangan, dan diakhiri penetapan target program dan pagu anggaran. Informan W-001, pejabat Perencanaan dan Keuangan, menjelaskan bahwa Data Basis menjadi fondasi penentuan target dan seluruh RKAKL berpijak padanya, dengan otoritas berjenjang dari Tim Kerja Perencanaan Keuangan hingga Sekretaris, Kepala Perwakilan, dan Kementerian. SIGA menjadi referensi data utama, dan informan menegaskan bahwa seluruh perencanaan dilakukan "*bounded rationality*", frasa yang mengekspresikan nilai institusional yang terinternalisasi, bukan sekadar kepatuhan prosedural.



Gambar 2. Siklus perencanaan kinerja berbasis data SIGA dan mekanisme tinjauan berjenjang

Tinjauan berjenjang berfungsi sebagai katup verifikasi karena setiap level dapat menguji konsistensi antara klaim kinerja dan data pendukungnya, sementara capaian LKj memperbarui basis data periode berikutnya. Data ditanam pada titik keputusan kunci, bukan dilekatkan belakangan sebagai pelengkap administratif. Temuan ini selaras dengan Cepiku et al. (2026) bahwa penggunaan informasi kinerja yang purposif memerlukan proses terstruktur yang menanamkan data dalam deliberasi, dan *Trilateral Meeting* menjadi arena

terinstitusionalisasi bagi dialog berbasis bukti (Laihonen et al., 2024). Temuan ini berbeda dari kepatuhan seremonial yang didokumentasikan Sofyani et al. (2018).

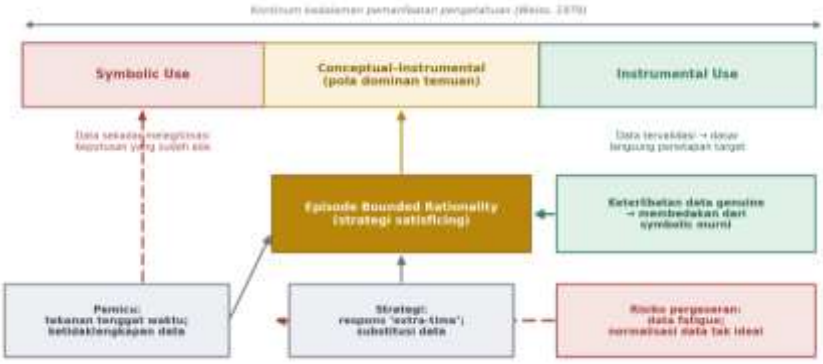
Budaya organisasi berbasis bukti dan kepemimpinan

Temuan kedua: budaya organisasi menunjukkan internalisasi genuine ketimbang kepatuhan superfisial. Wawancara mendeskripsikan budaya kerja berbasis bukti yang "mendukung implementasi penggunaan data dalam kebijakan", dengan data sebagai "patokan utama" dan kepemimpinan sebagai "*data driven champion*" yang meneladankan keputusan berorientasi data. Sejalan dengan Weiss (1979), konsultasi SIGA yang rutin dalam diskusi perencanaan menunjukkan *conceptual use* yang tertanam kuat dan menjadi prasyarat *instrumental use*. Hal ini berbeda dari temuan Muhtar et al. (2021) bahwa kepemimpinan di banyak pemerintah daerah memperlakukan LKj sebagai latihan kepatuhan. Status vertikal lembaga, dengan akuntabilitas langsung ke Kementerian, tampak meredam tekanan memanipulasi pelaporan bagi audiens politik lokal; W-001 menyatakan pengaruh intervensi politik lokal sangat minim, klaim yang berpijak pada arsitektur kelembagaan. Deschamps (2022) menemukan bahwa interferensi politik melemahkan interpretasi dan pelaporan data, sehingga isolasi relatif ini merupakan keunggulan struktural bagi perencanaan berbasis bukti.

Narasi W-001 menegaskan posisi data dalam keputusan. Ketika ditanya seberapa besar peran data SIGA dalam keputusan perencanaan, ia menjawab, "Sangat besar. Merencanakan sesuatu harus *by data*. Jadi patokan utama." Tentang siapa yang menggerakkan budaya tersebut, jawabannya ringkas: "Pimpinan Pak. Pimpinan selain menjadi pemberi contoh, pasti punya peran sentral." Budaya ini tampak pula pada mekanisme koreksi: "Yang namanya kebijakan tidak ujug-ujug diputuskan. Pasti dianalisa dulu datanya. Kalau ada yang salah pasti dikoreksi." Analisis dibebankan kepada tim kerja, dan bila ada "porsi analisa yang mungkin kurang tepat, di situlah dibutuhkan analisa lanjutan dari seorang *leader*". Dengan demikian pimpinan berfungsi bukan hanya sebagai teladan, melainkan juga sebagai lapisan verifikasi analitis, selaras dengan fungsi katup verifikasi pada tinjauan berjenjang. Terkait tekanan eksternal, W-001 menjawab tegas, "Enggak ada, enggak ada", dan menambahkan, "Institusi kita sangat minim pengaruh dari intervensi politik lokal karena ini institusi vertikal. Sasaran kita fokus pada keluarga." Isolasi ini tidak berarti tanpa interaksi dengan daerah, sebab BKKBN, menurut W-001, "ditunjuk mengangkat isu kependudukan kepada pemerintah daerah" melalui Rencana Aksi Daerah dan Peta Jalan Pembangunan Kependudukan.

Bounded rationality **dan strategi** ***satisficing*** **dalam pemanfaatan data**

Temuan ketiga, dan paling signifikan secara teoretis, adalah mekanisme *bounded rationality* yang menempatkan pemanfaatan SIGA di antara *instrumental* dan *symbolic use*. Terdapat dua strategi *satisficing* di bawah tekanan waktu dan ketidaklengkapan data: respons *extra time* dan substitusi data. W-001 menggambarkan respons *extra time* dengan metafora "tempur sebelum peluit terakhir berbunyi", model mental berorientasi penyelesaian (*completion oriented*) yang menempatkan tenggat di atas optimalitas analitis. Substitusi data lebih konsekuensial: W-001 mengakui penggunaan data yang "cukup baik" bila data optimal belum tersedia, misalnya data keluarga risiko stunting yang belum terbarui pada tenggat sehingga dipakai *snapshot* terkini dan "menyiasati cara pencapaiannya". W-005 menunjuk pembaruan yang tertinggal sebagai akar ketidaksinkronan data: "Perbedaan data antara SIGA, Pendataan Keluarga, dan instansi lain masih terjadi akibat dinamika perubahan penduduk yang belum segera diperbarui." Dampaknya, menurut W-005, adalah ketidakakuratan penentuan sasaran, alokasi anggaran, dan prioritas program. Infrastruktur memperberat hal itu: "Faktor geografis Bengkulu menyebabkan sinkronisasi data sering mengalami hambatan.".



Gambar 3. Posisi episode *bounded rationality* (*satisficing*) dalam taksonomi pemanfaatan pengetahuan Weiss

Perilaku ini berbeda dari *instrumental use* murni karena kualitas data belum memadai, dan dari *symbolic use* murni karena keterlibatan datanya genuine: perencana berkonsultasi dengan data SIGA nyata dan menilai validitasnya. Substitusi didorong keterbatasan struktural, bukan motif politik melindungi narasi yang telah ditentukan. Gambar 3 menempatkan episode ini pada zona intermediat kontinum pemanfaatan: keterlibatan genuine menariknya ke arah *instrumental use*, tetapi normalisasi data tidak ideal dan *data fatigue* dapat menggesernya ke arah *symbolic use* saat aparatur kurang peka terhadap

kesenjangan antara angka laporan dan realitas program (Deschamps, 2022). Tabel 2 merangkum matriks koding ketiga modus

Tabel 2. Matriks koding: modus pemanfaatan pengetahuan dalam praktik SIGA–LKj

Mode Pemanfaatan	Bukti dalam Data	Pola Dominan	Faktor Risiko
Instrumental use (Penggunaan Instrumental)	SIGA sebagai rujukan utama IKU; Trilateral Meeting berpijak pada Data Basis; verifikasi data berlapis sebelum keputusan	*Enabler* struktural kuat tersedia; terwujud sebagian dalam siklus perencanaan	Tekanan tenggat waktu; kesenjangan ketersediaan data
Conceptual use (Penggunaan Konseptual)	Budaya kerja berbasis bukti; pimpinan sebagai data champion; SIGA dikonsultasi rutin dalam rapat koordinasi	Terinternalisasi kuat; membentuk fondasi bagi *instrumental use*	Risiko tetap pada tataran konseptual tanpa terjemahan ke perubahan keputusan nyata
Symbolic use (Penggunaan Simbolis)	Substitusi data di bawah tenggat (*satisficing*); potensi penggunaan selektif saat data optimal tidak tersedia	Manifestasi *bounded rationality*; tidak didorong motif politik	Kelelahan data (*data fatigue*); normalisasi substitusi data tidak ideal

Sumber: Analisis penulis terhadap data wawancara dan dokumen, 2026

Hambatan institusional: keterbatasan anggaran dan beban peran ganda

Keterbatasan anggaran adalah hambatan struktural paling signifikan. W-001 menyebutnya tantangan dominan, bukan kegagalan regulasi atau defisit sumber daya manusia, melainkan realitas fiskal bahwa rencana program harus disesuaikan dengan kondisi keuangan negara. Hal ini selaras dengan *bounded rationality* di lingkungan terbatas sumber daya (Simon, 1997): pagu anggaran membatasi ambisi perencanaan berbasis bukti. Hambatan sekunder adalah beban peran ganda: personel yang sama bertanggung jawab atas entri data SIGA dan pencapaian target operasional, sehingga timbul konflik jadwal. Hal ini konsisten dengan Aisyah et al. (2025) tentang waktu yang tidak proporsional untuk mengisi sistem data dan lahirnya *data fatigue*, serta Anwar et al. (2026) bahwa kapasitas aparatur yang tidak dikelola membuat pemanfaatan sistem berhenti pada tataran administratif. Dari sisi pengelola data, W-005 menyatakan, "Banyak operator mengalami tugas rangkap sehingga beban kerja tinggi dan berdampak pada kualitas serta kecepatan pembaruan data." Informan membedakan hambatan teknis (konflik jadwal, dapat diatasi melalui fleksibilitas organisasi) dari hambatan struktural (anggaran, ditentukan eksternal), sebuah indikator kematangan organisasi dalam manajemen berbasis bukti.

Menuju tipologi pemanfaatan SIGA

Sintesis temuan menunjukkan pola dominan *primarily conceptual–instrumental*, dengan episode substitusi data akibat *bounded rationality* yang menimbulkan risiko periodik terhadap

symbolic use. Lembaga ini berinteraksi dengan SIGA sebagai sumber pengetahuan (membentuk pemahaman, menginformasikan deliberasi, dan mendasari target IKU), tetapi terkendala dari *instrumental use* penuh oleh kesenjangan data dan keterbatasan fiskal. Tipologi ini menyumbang kategori *middle-range* yang berdasar empiris di antara *instrumental* dan *symbolic use* murni, yang mungkin lazim di instansi Indonesia berbudaya bukti kuat namun berkondisi operasional menantang, dan mengundang studi komparatif.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Pemanfaatan data SIGA dalam penyusunan LKj di Kemendukbangga/BKKBN Perwakilan Provinsi Bengkulu paling tepat dicirikan sebagai *primarily conceptual–instrumental*, ditopang siklus perencanaan berjenjang, budaya kerja berbasis bukti, dan status kelembagaan vertikal yang meredam interferensi politik. Tekanan tenggat dan ketidaklengkapan data mendorong substitusi data sebagai strategi *satisficing*, yang mencerminkan keterlibatan data genuine dalam batas rasionalitas, tetapi berisiko bergeser ke arah simbolis bila dinormalisasi. Hambatan utama adalah keterbatasan anggaran dan beban peran ganda. Secara teoretis, penelitian ini memperluas *Knowledge Utilization Theory* melalui kategori *middle-range* yang dijelaskan *bounded rationality* dan menunjukkan bahwa desain institusional, khususnya akuntabilitas vertikal, menentukan modus pemanfaatan data.

Saran

Bagi Kemendukbangga/BKKBN Perwakilan Provinsi Bengkulu:

1. Menjadwalkan ekstraksi dan validasi data SIGA dalam kalender perencanaan dengan tenggat internal sebelum penyusunan draf LKj.
2. Menetapkan protokol substitusi data (alasan, sumber, tanggal, dan keterbatasan data pengganti) agar *satisficing* tetap transparan.
3. Memperkuat kapasitas analitik SIGA bagi penyusun LKj dan pengelola data, termasuk analisis tren dan perbandingan lintas kabupaten/kota.
4. Menata beban peran ganda antara entri data SIGA dan target operasional pada periode puncak pelaporan.
5. Bagi Kementerian PANRB: Melengkapi kriteria evaluasi SAKIP dengan indikator yang menilai apakah data SIGA digunakan untuk mengidentifikasi kesenjangan kinerja dan merekomendasikan penyesuaian program.

Keterbatasan penelitian meliputi kasus tunggal yang membatasi transferabilitas, jumlah informan yang terbatas, dan bias sosial desirabilitas yang tidak sepenuhnya dapat

dieliminasi. Penelitian lanjutan disarankan berupa studi komparatif antarperwakilan provinsi, termasuk dengan instansi daerah yang akuntabel secara lokal, dan studi longitudinal selama stabilisasi transisi kelembagaan dari BKKBN ke Kemendukbangga.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penelitian ini dilaksanakan sebagai bagian dari klaster penelitian terintegrasi PARF FISIP Universitas Bengkulu Tahun 2026. Para penulis berterima kasih kepada Kepala dan seluruh staf Kemendukbangga/BKKBN Perwakilan Provinsi Bengkulu atas akses penelitian dan partisipasi yang terbuka. Penelitian ini tidak menerima pendanaan eksternal.

DAFTAR RUJUKAN

Aisyah, D. N., Setiawan, A. H., Mayadewi, C. A., Lokopessy, A. F., Kozlakidis, Z., & Manikam, L. (2025). Understanding health information systems utilization across public health centers in Indonesia: Cross-sectional study. *JMIR Medical Informatics, 13*, Article e68613. https://doi.org/10.2196/68613

Anwar, K., Sugiyanto, L., & Koesoemaningsih, R. (2026). Manajemen pengembangan kompetensi sumber daya aparatur pemerintah desa dalam mendukung pelayanan publik berbasis digital di Kabupaten Ngawi. *Jurnal Manajemen Publik dan Kebijakan Publik (JMPKP), 8*(1), 166–188. https://jurnal.umb.ac.id/index.php/JMPKP/article/view/9920

Apriliani, N., A'dawiyah, D. R., Manan, A., & Farida, F. (2024). Implementasi program aplikasi Sistem Informasi Keluarga (SIGA) di Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) Kota Sukabumi. *Innovative: Journal of Social Science Research, 4*(2), 7175–7185. https://doi.org/10.31004/innovative.v4i2.9513

Cepiku, D., Mastrodascio, M., & Wang, W. (2026). Factors shaping the use of performance information by public managers. *Public Management Review, 28*(1), 158–179. https://doi.org/10.1080/14719037.2024.2435009

Deschamps, C. (2022). Performance management in public service organizations: Can data be useful to managers even when it is flawed or gamed? *International Public Management Journal, 25*(5), 672–691. https://doi.org/10.1080/10967494.2020.1863886

DiMaggio, P. J., & Powell, W. W. (1983). The iron cage revisited: Institutional isomorphism and collective rationality in organizational fields. *American Sociological Review, 48*(2), 147–160. https://doi.org/10.2307/2095101

Hood, C. (1991). A public management for all seasons? *Public Administration, 69*(1), 3–19. https://doi.org/10.1111/j.1467-9299.1991.tb00779.x

Idaiani, S., Hendarwan, H., & Herawati, M. H. (2023). Disparities of health program information systems in Indonesia: A cross-sectional Indonesian Health Facility Research 2019. *International Journal of Environmental Research and Public Health, 20*(5), Article 4384. https://doi.org/10.3390/ijerph20054384

Kasim, Z. N. R., Aneta, Y., & Mozin, S. Y. (2025). Penerapan e-government melalui aplikasi Sistem Informasi Keluarga (SIGA) di BKKBN Provinsi Gorontalo. *Jurnal Riset Rumpun*

Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora, 4(1), 633–640. https://doi.org/10.55606/jurrish.v4i1.5161

Laihonen, H., Kork, A.-A., & Sinervo, L.-M. (2024). Advancing public sector knowledge management: Towards an understanding of knowledge formation in public administration. *Knowledge Management Research & Practice, 22*(3), 223–233. https://doi.org/10.1080/14778238.2023.2187719

Laot, F. S., Katili, M. R., Lahay, S. N., Hadjaratie, L., & Hermila, A. (2025). Optimasi UI/UX berbasis design thinking pada Sistem Informasi Keluarga (SIGA): Studi kasus BKKBN Provinsi Gorontalo. *Jambura Journal of Informatics, 7*(2), 98–108. https://doi.org/10.37905/jji.v1i2.33904

Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2019). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (4th ed., international student ed.). SAGE Publications.

Muhtar, Arifin, T., & Sutaryo. (2021). Performance accountability in Indonesian local governments: Does monitoring really work? *International Journal of Business and Society, 22*(3), 1673–1692. https://doi.org/10.33736/ijbs.4329.2021

Nutley, S. M., Walter, I., & Davies, H. T. O. (2007). *Using evidence: How research can inform public services*. Policy Press.

Presiden Republik Indonesia. (2014). *Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah*.

Presiden Republik Indonesia. (2024). *Peraturan Presiden Nomor 180 Tahun 2024 tentang Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga*. https://peraturan.bpk.go.id/Details/306857

Simon, H. A. (1997). *Administrative behavior: A study of decision-making processes in administrative organizations* (4th ed.). Free Press.

Sofyani, H., Akbar, R., & Ferrer, R. C. (2018). 20 years of performance measurement system (PMS) implementation in Indonesian local governments: Why is their performance still poor? *Asian Journal of Business and Accounting, 11*(1), 151–184. https://doi.org/10.22452/ajba.vol11no1.6

Sugiyono. (2015). *Metode penelitian kualitatif*. Alfabeta.

Weiss, C. H. (1979). The many meanings of research utilization. *Public Administration Review, 39*(5), 426–431. https://doi.org/10.2307/3109916

Wika, A., & Priambodo, B. (2024). Efektivitas pembuatan surat perintah tugas melalui aplikasi SIPENO di Biro Umum Kantor Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur. *Jurnal Manajemen Publik dan Kebijakan Publik (JMPKP), 6*(2), 210–222. https://doi.org/10.36085/jmpkp.v6i2.6833